



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.649002/2021**



DS:7990-4750-4360-0486

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini di sahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |                     |   |
|-------------------------------|---------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)             | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : (03)              | Ditjen Administrasi Hukum Umum  |
| 3. Provinsi                   | : (30)              | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (649002)          | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG                               |
| Sebesar                       | : Rp. 1.858.350.000 | ( SATU MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03 BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
013.03 BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp	1.858.350.000
Rp	1.858.350.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |               |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 0             | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP                       |     |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan              | Rp. | 1.858.350.000 | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |               | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                        |          |               |
|------------------------|----------|---------------|
| 1. KPPN PANGKAL PINANG | (015) Rp | 1.858.350.000 |
|------------------------|----------|---------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A. N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ttd  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.649002/2021**



DS:7990-4750-4360-0486

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |   |                   |   |
|-------------------------------|---|-------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (013)             | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : | (03)              | Ditjen Administrasi Hukum Umum  |
| 3. Provinsi                   | : | (30)              | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG   |
| 4. Kode/Nama Satker           | : | (649002)          | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG                               |
| Sebesar                       | : | Rp. 1.858.350.000 | ( SATU MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.858.350.000	Jumlah Uang
013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	1.858.350.000	

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	1.858.350.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN PANGKAL PINANG	(015) Rp.	1.858.350.000
------------------------	-----------	---------------

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.03.2.649002/2021

I A. INFORMASI KINERJA



DS:7990-4750-4360-0486

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (649002) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : I A. 1

Program	:	013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.858.350.000
Kegiatan	:	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			1.858.350.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase peningkatan PNPB Administasi Hukum Umum di wilayah			
		2. 01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			
		3. 02	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5251.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3,00	Rekomendasi Kebijakan	652.280.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi penyelesaian permasalahan kenotariatan pada Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan di Wilayah	3,00	Rekomendasi Kebijakan	652.280.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5251.AEA	Koordinasi	15,00	kegiatan	514.640.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	15,00	kegiatan	514.640.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7,00	layanan	531.050.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	7,00	layanan	531.050.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	1.370.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan perkara pada kantor wilayah	1,00	Perkara	1.370.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2,00	Lembaga	159.010.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	2,00	Lembaga	159.010.000

Jakarta, 23 November 2020  
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

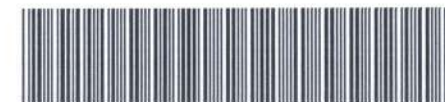
ttd.  
 Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
 NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : DIPA- 013.03.2.649002/2021**

**I B. SUMBER DANA**



DS:7990-4750-4360-0486

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (649002) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : I B. 1

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2021	Rp.	1.858.350.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNBP	Rp.	1.858.350.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.03.2.649002/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7990-4750-4360-0486

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (649002) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG  
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
 (dalam ribuan rupiah)

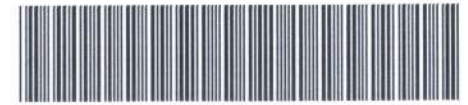
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
649002	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	-	1.858.350	-	-	-	1.858.350		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.858.350	-	-	-	1.858.350		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.858.350	-	-	-	1.858.350		
5251.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	652.280	-	-	-	652.280	30.51	
04	PNBP	-	652.280	-	-	-	652.280	015	
5251.AEA	Koordinasi (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	514.640	-	-	-	514.640	30.51	
04	PNBP	-	514.640	-	-	-	514.640	015	
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	531.050	-	-	-	531.050	30.51	
04	PNBP	-	531.050	-	-	-	531.050	015	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	1.370	-	-	-	1.370	30.51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.03.2.649002/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7990-4750-4360-0486

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (649002) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG  
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	1.370	-	-	-	1.370	015	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (30.51 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	159.010	-	-	-	159.010	30.51	
04	PNBP	-	159.010	-	-	-	159.010	015	
<b>JUMLAH</b>		-	1.858.350	-	-	-	1.858.350		

Jakarta, 23 November 2020  
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
 Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
 NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.03.2.649002/2021

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7990-4750-4360-0486

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum  
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (649002) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : III. 1  
 (dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	649002	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	189.450	188.520	180.000	189.310	185.000	184.610	182.930	113.420	184.080	187.790	73.240	1.858.350
		BELANJA BARANG	0	189.450	188.520	180.000	189.310	185.000	184.610	182.930	113.420	184.080	187.790	73.240	1.858.350
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	189.450	188.520	180.000	189.310	185.000	184.610	182.930	113.420	184.080	187.790	73.240	1.858.350
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	189.450	188.520	180.000	189.310	185.000	184.610	182.930	113.420	184.080	187.790	73.240	1.858.350

Jakarta, 23 November 2020  
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
 Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
 NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.649002/2021  
IV A. B L O K I R**



DS:7990-4750-4360-0486

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : [30] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode dan Nama Satker : [649002] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

tt.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 013.03.2.649002/2021  
IV B. C A T A N**



DS:7990-4750-4360-0486

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum  
Provinsi : [30] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kode dan Nama Satker : [649002] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG

Halaman : IV.B. 1

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 23 November 2020  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttt.  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP 196909181994031001